

HASIL RUMUSAN SIDANG KOMISI BIDANG LLAJ 1 (LALU LINTAS DAN ANGKUTAN)

- Ketua Sidang : Ir. KUSNENDI SOEHARDJO, MS.Tr, Kepala Bidang Lalu Lintas Darat, Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Jawa Barat
- Sekretaris : Ir. HOTMA P. SIMANJUNTAK,MS.Tr, Kasubdit LLJ, DIT. LLAJ Ditjen Perhubungan Darat
- Nara Sumber : Ir. SUGIHARJO, Msi, Plh. Direktur LLAJ Ditjen Perhubungan Darat
- Notulen : 1. PANDU YUNianto, ATD.MEngSc.
2. I MADE SUARTIKA, ATD.MEngSc.
3. ARDONO, ATD.MT,
4. DODY ARIFianto, A.Md
- Tim Perumus : 1. PANDU YUNianto, ATD.MEngSc.
2. I MADE SUARTIKA, ATD.MEngSc.
3. Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Barat
4. Dinas Perhubungan Propinsi Papua
5. Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, Banten
6. Dinas Perhubungan Kota Palembang, Sumatera Selatan
7. Dinas Perhubungan Kabupaten Kepahiang, Bengkulu

I. PENDAHULUAN

Sidang komisi Bidang LLAJ 1 membahas materi sub Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang terdiri dari 6 (enam) substansi yaitu :

- a. sub bidang Tata Hubungan Kerja dan Kelembagaan yang meliputi 2 (dua) butir substansi,
- b. sub bidang perencanaan Pembangunan, keperintisan dan sistem informasi yang meliputi 3 (tiga) butir substansi dan
- c. koordinasi dan Pengawasan yang meliputi 1 (satu) substansi .

II. HASIL PERUMUSAN

A. Materi bahasan

1. Prosedur pengusulan program pembangunan yang didanai oleh APBN;
2. Tertib penyelenggaraan angkutan umum;
3. Pemberdayaan PPNS di bidang LLAJ;
4. Jaringan Lintas Angkutan Peti Kemas;

5. Penerapan Nomor Rute Jalan;
6. Efektifitas pengawasan muatan lebih.

Usulan tambahan materi bahasan :

1. Kewenangan penyidikan PPNS LLAJ;
2. Penilngan pelanggaran LLAJ → bukan Berita Acara tapi Catatan Pelanggaran;
3. Pengawalan;
4. Pengaturan Lalu Lintas di jalan.

B. Hasil Pembahasan

I. Tata Hubungan Kerja dan Kelembagaan

1. Prosedur pengusulan program pembangunan yang didanai oleh APBN.

Untuk mensinkronkan pengusulan program pembangunan dari Kabupaten/ Kota perlu mengacu KM 4 Tahun 2003 tentang Tata Hubungan Kerja Pemerintah Pusat dan Propinsi, dengan memperhatikan :

- a. Sesuai dengan mekanisme pembahasan usulan program pembangunan di daerah yang telah berlaku sampai saat ini, agar pembahasan dikoordinasikan oleh Propinsi melalui musrenbang tingkat Propinsi.
 - b. Kabupaten / Kota dapat mengusulkan program pembangunan yang didanai APBN langsung ke Pusat dengan tembusan kepada Dinas Perhubungan / LLAJ Propinsi sebagai advisory untuk menentukan skala prioritas sesuai kebutuhan.
 - c. Sebagai justifikasi usulan program pembangunan perlu didukung dengan data kebutuhan melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM) bidang LLAJ.
 - d. Waktu pengusulan program dari Kabupaten/Kota dan propinsi menyesuaikan dengan jadwal pembahasan di Pusat.
2. Tertib penyelenggaraan angkutan umum

Untuk meningkatkan tertib penyelenggaraan angkutan baik di terminal maupun di jalan maka perlu :

- a. peningkatan intensitas pemeriksaan angkutan umum di terminal dan di jalan;
- b. peningkatan pengetahuan dan kemampuan petugas terminal melalui kursus / penataran secara berkala, tidak terbatas dilaksanakan oleh pemerintah pusat tapi juga dapat dilakukan oleh pemerintah propinsi yang dibiayai oleh APBD propinsi dengan narasumber dari pusat;

- c. untuk kendaraan bermotor tidak umum (plat hitam) yang beroperasi sebagai kendaraan umum perlu penerapan sanksi yang dapat memberikan efek jera (sanksi pidana)

II. Perencanaan Pembangunan, Keperintisan dan Sistem Informasi

1. Pemberdayaan PPNS di bidang LLAJ

- a. untuk keseragaman prosedur penyidikan perkara pelanggaran lalu lintas jalan perlu keseragaman format catatan pelanggaran;
- b. untuk jangka panjang maka perlu perubahan strategis dan revolusioner terhadap peraturan perundang-undangan LLAJ khususnya ketegasan tentang kewenangan PPNS bidang LLAJ dalam penyidikan terhadap pelanggaran LLAJ tanpa mencantumkan tupoksi POLRI karena sudah diatur dalam undang-undang organiknya;
- c. Untuk mengatasi keterbatasan Diklat PPNS dan untuk pemenuhan kebutuhan jumlah tenaga PPNS maka perlu :
 - bantuan teknis dari Pemerintah Pusat untuk penyelenggaraan Diklat PPNS Tingkat Nasional;
 - Perlu pemberdayaan Badan Diklat Propinsi untuk menyelenggarakan Diklat PPNS dengan sylabus yang berlaku secara Nasional;

2. Jaringan Lintas Angkutan Peti Kemas

- a. Untuk memenuhi kebutuhan lintasan-lintasan angkutan peti kemas di seluruh Indonesia maka perlu penetapan jaringan lintas angkutan peti kemas di pulau-pulau lainnya di luar Pulau Jawa.
- b. Jaringan peti kemas perlu diusulkan oleh Dinas Perhubungan Propinsi dan Kabupaten / Kota kepada Ditjen Perhubungan Darat sesuai kebutuhan angkutan dengan mempertimbangkan daya dukung jalan;

3. Penerapan Nomor Rute Jalan

Dalam rangka untuk keseragaman bentuk, warna dan ukuran Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ), untuk memberikan kemudahan bagi pemakai jalan serta untuk mengantisipasi pemberlakuan ASIAN HIGHWAY NETWORK, maka perlu ditetapkan sosialisasi dalam bentuk uji coba penerapan nomor rute jalan di pulau Jawa dengan penempelan pada RPPJ yang ada dan pengantian RPPJ yang lama. Dimasa yang akan datang hal ini akan dikembangkan ke pulau-pulau lain.

III. Koordinasi dan Pengawasan

1. Efektifitas pengawasan muatan lebih
 - a. Untuk meningkatkan efektifitas pengawasan muatan lebih maka perlu peningkatan kapasitas peralatan penimbangan, kemampuan petugas jembatan timbang dan peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaannya;
 - b. Mengembangkan uji coba pengoperasian jembatan timbang yang dikerjasamakan dengan swasta seperti di NAD dan Sumatera Barat di wilayah lain.
 - c. Perlu dilakukan evaluasi secara periodik terhadap penyelenggaraan jembatan timbang;
 - d. Perlu dikoordinasikan dengan jajaran PU tentang kekuatan daya dukung jalan dan spesifikasi konstruksi jalan.
 - e. Perlu adanya pembenahan pada standarisasi kendaraan angkutan barang menyesuaikan dengan kekuatan daya dukung jalan;

- C. Hasil Perumusan Komisi Bidang LLAJ 1 (sub bidang Lalu Lintas dan Angkutan) secara lebih rinci sebagaimana matrik terlampir.

III. PENUTUP

Demikian hasil perumusan sidang Komisi Bidang LLAJ 1 (sub bidang Lalu Lintas dan Angkutan) untuk dijadikan bahan pada sidang pleno.

Yogyakarta, 24 Nopember 2005

KOMISI BIDANG LLAJ 1 (SUB BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN)

Ketua

Ir. KUSNENDI SOEHARDJO, MS.Tr :

Sekretaris

Ir. HOTMA P. SIMANJUNTAK,MS.Tr :

Komisi I

Bidang LLAJ I (Angkutan dan Lalu Lintas)

Peserta :

1. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Nangroe Aceh Darussalam
2. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara
3. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Riau
4. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan
5. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Bengkulu
6. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Bangka Belitung
7. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Lampung
8. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Banten
9. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi
DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat
11. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon
12. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang
13. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lebak
14. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pandeglang
15. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Serang
16. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tangerang
17. Kepala Sub Dinas Perhubungan
Kota Jakarta Pusat
18. Kepala Sub Dinas Perhubungan
Kota Jakarta Barat
19. Kepala Sub Dinas Perhubungan
Kota Jakarta Selatan
20. Kepala Sub Dinas Perhubungan
Kota Jakarta Timur
21. Kepala Sub Dinas Perhubungan
Kota Jakarta Utara
22. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung
23. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjar
24. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi
25. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor
26. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi
27. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon
28. Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok
29. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi
30. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya
31. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ciamis
32. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bandung
33. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bekasi
34. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bogor
35. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Cianjur

36. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Cirebon
37. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Garut
38. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Indramayu
39. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Karawang
40. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kuningan
41. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Majalengka
42. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Purwakarta
43. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Subang
44. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sukabumi
45. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sumedang
46. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tasikmalaya.
47. Kepala Dinas Perhubungan Kota Magelang
48. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
49. Kepala Dinas Perhubungan Kota Salatiga
50. Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang
51. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta
52. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tegal
53. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sragen
54. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara
55. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banyumas
56. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Batang
57. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Blora
58. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Boyolali
59. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Brebes
60. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Cilacap
61. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Demak
62. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Grobogan
63. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Jepara
64. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Karanganyar
65. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kebumhen
66. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kendal
67. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Klaten
68. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kudus
69. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Magelang
70. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pati
71. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pekalongan
72. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pemasang
73. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Purbalingga
74. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Purworejo
75. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Rembang
76. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Semarang
77. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sukoharjo
78. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tegal
79. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Temanggung
80. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Wonosobo
81. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Wonogiri

82. Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
83. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bantul
84. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Gunung Kidul
85. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kulon Progo
86. Kepala Dinas perhubungan Kab. Sleman
87. Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu
88. Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar
89. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri
90. Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun
91. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang
92. Kepala Dinas Perhubungan Kota Mojokerto
93. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pasuruan
94. Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo
95. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya
96. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Malang
97. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bangkalan
98. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banyuwangi
99. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Blitar
100. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bojonegoro
101. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bandowoso
102. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Gresik
103. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Jember
104. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Jombang
105. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kediri
106. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lamongan
107. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lumajang
108. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Madiun
109. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Magetan
110. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Mojokerto
111. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nganjuk
112. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ngawi
113. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pacitan
114. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pamekasan
115. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pasuruan
116. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ponorogo
117. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Probolinggo
118. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sampang
119. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sidoarjo
120. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Situbondo
121. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sumenep
122. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Trenggalek
123. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tuban
124. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tulungagung
125. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar
126. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Badung
127. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Buleleng

128. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Gianyar
129. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tabanan
130. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bangli
131. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Jembrana
132. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Karang Asem
133. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Klungkung
134. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Dompus
135. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barru
136. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Jeneponto
137. Balai PLJSKB Bekasi